

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

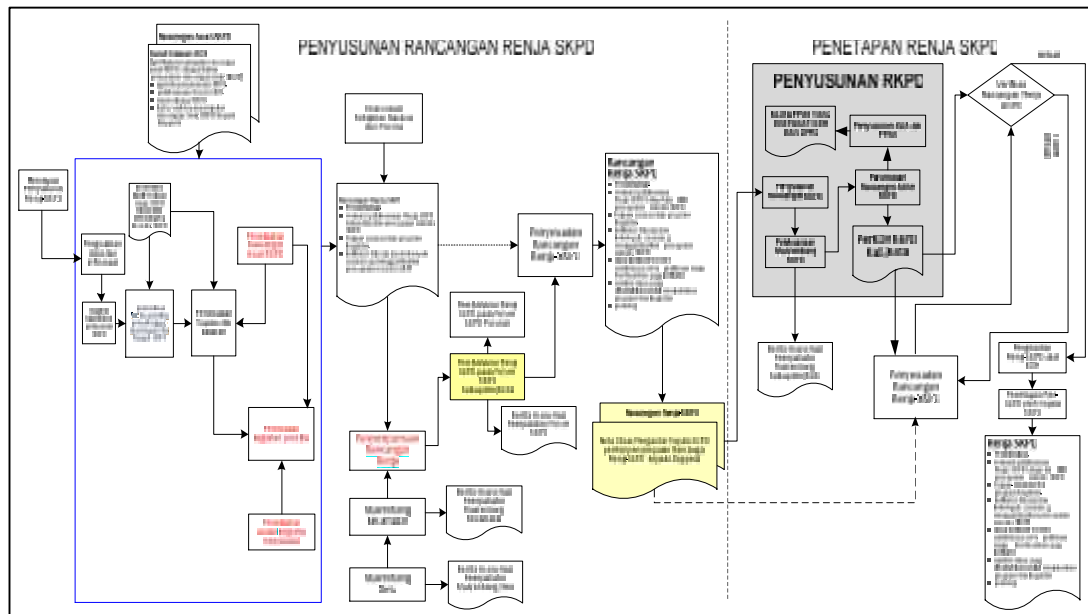
Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia maksimal pada bulan oktober 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kecamatan Nglegok perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja PD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja PD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja PD yang mampu mensinergikan antara program dan kegiatan maupun dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja PD mengacu dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.



Bagan diatas menunjukkan gambaran umum alur penyusunan Renja PD secara keseluruhan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nglegok. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nglegok dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## 1.2.LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kecamatan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2011 - 2016.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- i. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 tentang penjelasan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Blitar.
- j. Surat Edaran dari Bupati Blitar Nomor : 050/59.2/409.201/2017 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja –PD) Tahun 2019.

### **1.3.MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dirumuskan sesuai dengan tujuan Kecamatan Nglepok dan penyesuaian pada hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Sehingga tujuan yang ditekankan pada renja tahun 2019 sebagai berikut;

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Kesiapan secara sistemik dan prosedural bagi aparatur terkait penyusunan rencana kegiatan yang sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004.
2. Meningkatkan ruang aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan implementasi (pelaksanaannya) program Kecamatan ataupun Kelurahan/desa.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar.

### **1.4.SISTIMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja PD) Kecamatan Nglepok adalah dengan menggunakan metode sesuai dengan Permen 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmentGoals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN**

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Kecamatan Nglegok pada tahun 2018 telah melaksanakan 5 (lima) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing – masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 162.027.530,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.242.982 dengan prosentase penyerapan sebesar 98,90`%

Indikator programnya adalah : Penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,90 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 98,90 %

**-Keberlanjutan** :Meningkatnya kualitas pengetahuan aparatur dalam mengoperasikan fasilitas tehnologi dan mempermudah akses informasi serta publikasi data terkait kegiatan Kecamatan, Anggaran, dan informasi lainnya.

**-Hambatan** : Kurangnya sarana dan prasarana Teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.

**-Pendorong** : tingginya rasa tanggung jawab aparatur dan *dateline* penyelesaian tugas atau pekerjaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 407.500950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.398.470.600 dengan prosentase penyerapan 97,78 %

Indikator programnya adalah : Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 97,78 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 88,65 %.

3. Program Perencanaan , penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 30.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesarRp.30.500.000,-

Indikator programnya adalah : Jumlah laporan yang dikirim sesuai permintaan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 90 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah laporan yang dikirim sesuai permintaan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

4. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.747.220.011, - dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.901.411

Indikator programnya adalah : Jumlah laporan monev dan evaluasi yang dibuat dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 90 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Restribusi Daerah

Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi pajak dan restribusi daerah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi desa/kelurahan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

- c. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan Indikator Outputnya adalah Jumlah Desa yang di evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
  - d. Kegiatan BinteK pengelolaan keuangan daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
  - e. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan  
Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
  - f. Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna, PKK, Muspika Perwosi, Posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan  
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi PKK desa/kelurahan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
  - g. Kegiatan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Desa/Kelurahan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 87,06 %
  - h. Fasilitasi Monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%
  - i. Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%
  - j. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%
5. Program Pelayanan Kecamatan Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 97,09 %
- Indikator programnya adalah : Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan. Dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 % .
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa  
Kapasitas Aparatur Kecamatan

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

Khusus belanja langsung seharusnya ada peningkatan anggaran sehingga bisa membawa dampak yang lebih baik terhadap target capaian program Renstra PD Kecamatan Nglegok terutama pada bidang pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

- Harus adanya internet yang cukup untuk pelayanan KTP, KK kepada masyarakat;
- Harus adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;
- Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan PD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh Kecamatan Nglegok dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

**Tabel 2.1.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018**  
**Provinsi/Kabupaten Blitar**

**Kecamatan nglegok**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	<b>Urusan Wajib</b>		<b>100%</b>	<b>97,75</b>	<b>93,8</b>	<b>55,12</b>	<b>0,587</b>	<b>93,8</b>	<b>246,67%</b>	<b>2,466%</b>		
4	1	<b>Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>97,75</b>	<b>93,8</b>	<b>55,12</b>	<b>0,587</b>	<b>93,8</b>	<b>246,67%</b>	<b>2,466%</b>		
4	1	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>93,02%</b>	<b>0,968%</b>	<b>98%</b>	<b>289,02%</b>	<b>0,98%</b>
4	1	<b>01</b>	<b>02</b>	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	98%	93,02%	0,968%	98%	289,02%	0,98%
4	1	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>88,65%</b>	<b>0,985%</b>	<b>90%</b>	<b>273,65%</b>	<b>2,736%</b>
4	1	<b>02</b>	<b>02</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	100%	95%	88,65%	0,985%	90%	273,65%	2,736%
4	1	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>00%</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>0,9%</b>
4	1	<b>06</b>	<b>10</b>	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP, Dokumen Laporan Keuangan, Renstra dan Review Renstra PD, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA, DPPA PD, Data LPPD, LPSE	100%	00%	90%	0%	90%	90%	0,9%

4	1			<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>90%</b>	<b>99,10 %</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>1,108%</b>	<b>95%</b>	<b>294,1%</b>	<b>326,7%</b>
4	1			Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	<b>90%</b>	<b>99,10%</b>	95%	<b>100%</b>	1,108%	<b>95%</b>	<b>294,1%</b>	<b>326,7%</b>
4	1	63		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan</b>	<b>99%</b>	<b>99,97%</b>	<b>95%</b>	<b>11,88%</b>	<b>0,125%</b>	<b>60%</b>	<b>171,85%</b>	<b>1,735%</b>
4	1	63	01	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Restribusi Daerah tepat waktu	<b>100%</b>	<b>99,90%</b>	90%	<b>50,50%</b>	0,561%	<b>90%</b>	240,4%	2,404%
4	1	63	02	Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Desa / Kelurahan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>	95%	<b>100%</b>	1,052%	<b>95%</b>	295%	2,95%
				Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa/Kelurahan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	95%	<b>0</b>	0%	<b>95%</b>	195%	1,95%
4	1	63	04	Bimtek Pengelolaan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	<b>90%</b>	<b>99,10%</b>	95%	<b>100%</b>	1,108%	<b>95%</b>	<b>294,1%</b>	<b>326,7%</b>
4	1	63	05	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>	95%	<b>100%</b>	1,108%	<b>95%</b>	295%	2,95%
4	1	63	06	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>	95%	<b>100%</b>	0,105%	<b>95%</b>	295%	2,95%
4	1	63	07	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah ( PMKS ) Desa/ Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	95%	<b>100%</b>	0,108%	<b>95%</b>	<b>295%</b>	2,95%

4	1	63	09	Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1	63	10	Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Musrenbang Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan	Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1	64		<b>Program Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>90%</b>	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	<b>294,1%</b>	<b>326,7%</b>
4	1	64	01	Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Terlaksananya Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	<b>90%</b>	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	<b>294,1%</b>	<b>326,7%</b>
4	1	64	02	Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan	Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	99%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	0,656%

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Nglegok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Nglegok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Nglegok melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh kecamatan Nglegok dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya kecamatan Nglegok tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, kecamatan Nglegok akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika kecamatan nglegok membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa kecamatan Nglegok belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Sehingga tolak ukur indikator kinerja kecamatan nglegok hanya diukur dengan berapa besar anggaran yang tersedia dan direalisasikan, hal ini disebabkan karena PD yang terkait untuk menilai kinerja PD salah satu contohnya adalah Inspektorat tidak pernah memberikan hasil penilaian dari Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP-PD) sehingga PD Kecamatan sampai tahun 2016 tidak pernah mengetahui sejauh mana kinerja PD, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dibenahi atau yang harus dipertahankan.

Tabel 2.2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Nglegok  
Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu pelayanan pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
2	Ketepatan waktu pelayanan pengantar Kartu Keluarga (KK)		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
3	Ketepatan waktu pelayanan pengantar pindah tempat		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
4	Ketepatan waktu pelayanan pengantar SKCK		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
5	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan lahir		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
6	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan miskin (SKM)		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
7	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan waris		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
8	Ketepatan waktu pelayanan Surat Menyurat		Ketepatan Pelayanan Waktu	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
9	Ketersediaan komputer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	5 unit	6 unit	8 unit	10 unit	terpenuhi target
10	Ketersediaan printer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit	terpenuhi target

11	Ketersediaan mesin ketik sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	tidak mengajukan pengadaan mesin ketik dikarenakan mesin ketik yang lama masih ada
12	Ketersediaan peralatan kebersihan kantor pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
13	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
14	Ketersediaan alat tulis kantor pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
15	Tercukupinya komunikasi dan listrik sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
16	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
17	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
18	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
19	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
20	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pra musrenbang		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	Sesuai jadwal
21	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB		Jumlah pembayaran pajak	80%	80%	80%	80%	80%	100 %	98,7 %	80%	80%	80%	melampaui target yang diinginkan
22	Ketepatan penyusunan Rencana kerja		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Sesuai jadwal



13	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
14	Ketersediaan alat tulis kantor pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
15	Tercukupinya komunikasi dan listrik sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
16	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
17	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
18	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
19	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi



### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Nglegok, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Nglegok dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Nglegok sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Nglegok yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Nglegok.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Nglegok dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Nglegok, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing PD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat PD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk PD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Nglegok sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Nglegok sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Nglegok, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (komputer).

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good govermance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Nglegok dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and*

*punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;

(4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “*Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera , maju dan berdaya saing.* “ . Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nglegok untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Nglegok mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Nglegok masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Nglegok dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA PD;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Nglegok, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
  2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
  3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
- Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan Kecamatan Nglegok inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

#### **1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Nglegok berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Nglegok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di PD Kecamatan Nglegok Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 2.4.1, sebagai berikut :

**Tabel 2.4.1**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar\***

**Nama PD : KECAMATAN NGLEGOK**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kepuasan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kepuasan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	
1.1	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Nglegok	Jumlah jenis layanan administrasi Perkantoran	11 jenis	<b>200.000.000</b>	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Nglegok	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	11 jenis	220.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>302.5000.000</b>	
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Nglegok	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik	64	<b>275.000.000</b>	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Nglegok	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	64	<b>302.5000.000</b>	Sesuai
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase dokumen Perencanaan,laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase dokumen Perencanaan,laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>13.200.000</b>	Sesuai
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Nglegok	Jumlah Dokumen	5 dokumen	4.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Nglegok	Jumlah Dokumen	5 dokumen	4.950.000	Sesuai
3.2	Penyusunan Dokumen penganggaran dan Pelaporan keuangan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Nglegok	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	2.200.000	Sesuai

3.3	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah.	Kecamatan Nglegok	Jumlah Desa/Kel. Yang memiliki Profil	11 Desa/Kel	5.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Kecamatan Nglegok	Jumlah Desa/Kel. yang memiliki Profil	12 Desa/Kel	6.050.000	Sesuai
		Kecamatan Nglegok					Kecamatan Nglegok				
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>60.500.000</b>	<b>Sesuai</b>
4.1	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	25 orang	5.500.000	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	<b>1 orang</b>	6.050.000	Sesuai
5	<b>Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik</b>	<b>70%</b>	<b>965.022.000</b>	<b>Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik</b>	<b>70%</b>	<b>165.022.000</b>	Sesuai
5.1	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Desa yang dibina	11 Desa/Kel	331.472.000	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Desa yang dibina	11 Desa/Kel.	15.500.000	Sesuai
5.2	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah	Kecamatan Nglegok	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	11 Desa/Kel	75.550.000	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan diwilayah	Kecamatan Nglegok	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	26 kali	14.300.000	Sesuai
5.3	Fasilitasi , Pembinaan ,monitoring ,evaluasi Kantrantibmas, dan Penegakan Peraturan Perundangan	Kecamatan Nglegok	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	11 Desa/Kel	13.600.000	Fasilitasi dan Pembinaan Kantrantibmas, Penegakan Peraturan Perundangan	Kecamatan Nglegok	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	11 Desa/Kel	11.700.000	Sesuai
5.4	Fasilitasi pmbinaan dan Monev ekonomi,Sosial Budaya dan Keagamaan	Kecamatan Nglegok	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	11 Desa/Kel	84.400.000	Fasilitasi pmbinaan dan Monev ekonomi,Sosial Budaya dan Keagamaan	Kecamatan Nglegok	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	11 Desa/Kel	9.700.000	
							Kecamatan Nglegok				

<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Kecamatan</b>		<b>Persentase kepuasan masyarakat</b>	<b>70%</b>	<b>107.066.000</b>	<b>Program Pelayanan Kecamatan</b>	Kecamatan Nglegok	<b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>70%</b>	<b>163.000.000</b>	Sesuai
6.1	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nglegok	Jumlah Obyek Monev	12 Desa/Kel	99.066.000	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nglegok	Jumlah obyek Monev	12 desa/kel	120.000.000	Sesuai
6.2	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Nglegok	Jumlah ijin yang diterbitkan	ijin	8.000.000	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Nglegok	Jumlah ijin yang diterbitkan	ijin	43.000.000	Sesuai
<b>J U M L A H</b>					<b>1.524.688.000</b>					<b>924.222.000</b>	

## 1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar PD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalan usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan januari);
2. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (minggu IV bulan januari s/d minggu I bulan februari);

3. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum PD. Pada tahap ini peranan PD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka (minggu II bulan februari);
4. Forum PD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan PD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
5. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing PD terkait. (minggu II bulan maret).

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung Kecamatan Nglekok pada tahun 2017 di bagi beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
2. Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
3. Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
4. Peningkatan Infrastruktur ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi PD**

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
  - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
  - Penguatan pengawasan
  - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
  - Penataan dan penguatan organisasi
  - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
  - Penataan peraturan penundang-undangan
  - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya

harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia maksimal pada bulan oktober 2015.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2019 memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	1. Menyediakan kebutuhan pelayanan rutin administrasi perkantoran,  2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1. Kebutuhan administrasi perkantoran dapat dipenuhi  2. Pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif
2.	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat segera dipenuhi/tepat waktu
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kerjasama Para Penyelenggara pemerintahan	Meningkatnya fasilitasi, monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/ Kelurahan tepat waktu  2. Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah tepat waktu  3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Desa/ Kelurahan tepat waktu  4. Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/ Kelurahan tepat waktu

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Nglegok maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Nglegok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Nglegok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Nglegok. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Nglegok melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehingga dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan PD Kecamatan Nglegok pada tahun 2019 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu “*Menuju Kabupaten Blitar yang lebih Sejahtera, Maju dan berdaya saing* ”.

Jumlah seluruh program di tahun 2019 di Kecamatan Nglegok sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu kecamatan Nglegok dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 764.471.000,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2019 ada di tabel 3.3.1 dibawah ini :

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1.**

**Rumusan Rencana Program/Kegiatan PD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Pemerintah Kabupaten Blitar**

**Nama PD : Kecamatan Nglegok**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Urusan Wajib</b>									
4	1	<b>Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian &amp; Persandian</b>			1.771.285.650				924.222.000	
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	226.683.800	DAU		100%	220.000.000	
4	1	20	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Kecamatan Nglegok	6 layanan	226.683.800	DAU	6 layanan	220.000.000
4	1		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi		100%	594.284.400	DAU	100%	302.500.000
4	2		Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik	Kecamatan Nglegok	80	594.284.400	DAU	90	302.500.000
4	1	6	Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	Kecamatan Nglegok	83%	8.635.000	DAU	97%	13.200.000
4	1	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	Kecamatan Nglegok	5 dokumen	2.325.000	DAU	5 dokumen	4.950.000
4	1	6	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Kecamatan Nglegok	5 Dokumen	1.550.000	DAU	5 Dokumen	2.200.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	1	6		Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Jumlah Desa /Kelurahan yang memiliki Profil	Kecamatan Nglegok	11 Desa/Kel	4.376.000	DAU		11 Desa/Kel	6.050.000
4	1	6		<b>Pogram peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur</b>	Kecamatan Nglegok	25	<b>48.200.000</b>	<b>DAU</b>		<b>25</b>	<b>60.500.000</b>
4	1	6		Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Nglegok	25	48.200.000	DAU		25	60.500.000
4	1	63		<b>Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik</b>	Kecamatan Nglegok	<b>70%</b>	<b>862.982.450</b>	<b>DAU</b>		<b>80%</b>	<b>165.022.000</b>
4	1	63	01	Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang dibina	Kecamatan Nglegok	11 desa/Kel	485.784.800	DAU		12 Desa/Kel	15.500.000
4	1	63	02	Fasilitasi,Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kecamatan Nglegok	12 Desa/Kel	75.550.000	DAU		12 Desa/Kel	14.300.000
4	1	63	04	Fasilitasi dan Pembinaan Kantramtibmas, Penegakan Peraturan Perundangan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Nglegok	12 Desa/Kel	14.320.000	DAU		12 Desa/Kel	11.700.000
4	1	63	05	Fsilitasi pembinaan dan Monev ekonomi,Sosial,Budaya dan Keagamaan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Nglegok	12 Desa/Kel	155.730.000	DAU		12 Desa/Kel	9.700.000
4	1	63	06	Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan publik dikel nglegok	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Kecamatan Nglegok	9 Desa	131.597.650	DAU		0	0
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nglegok (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana Prasarana yang Dibangun dan dipelihara	Kelurahan Nglegok	1 kelurahan	370.0000.000	DAU		1 kelurahan	370.0000.000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nglegok (APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang Dibangun dan dipelihara	Kelurahan Nglegok	1 kelurahan	735.000.000	APBD		1 kelurahan	735.000.000
4	1	64		<b>Program Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase kepuasan masyarakat</b>	Kecamatan Nglegok	<b>70%</b>	<b>30.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80%</b>	<b>163.000.000</b>
4	1	64	1	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Obyek Monev	Kecamatan Nglegok	12 Desa/Kelurahan	22.100.000	DAU		12 Desa/Kel	120.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	1	64	2	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Jumlah ijin yang diterbitkan	Kecamatan Nglegok	100 Ijin	8.400.000	DAU		120 Ijin	43.000.000
<b>J U M L A H</b>								<b>1.771.285.650</b>			<b>924.222.000</b>	

## **BAB V P E N U T U P**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Nglegok maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Nglegok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Nglegok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Nglegok antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah (pelayanan publik)
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Penataan organisasi dan manajemen publik
4. Pengelolaan keuangan dan barang

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Nglegok masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya Kecamatan Nglegok dalam memahami Program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA PD;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Masih kurangnya ruang arsip, sehingga belum Penataan administrasi, khususnya arsip dokumen yang sangat vital belum optimal. Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Nglegok, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Nglegok untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;

2. Mengoptimalkan pemahaman penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada PD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

NGLEGOK, 17 Juli 2019

**Camat**

**AAN ERNAWANTO, SE, MM**

Pembina Tk I

NIP. 19700426 199703 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Nglegok maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Nglegok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Nglegok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Oleh karenanya kecamatan Nglegok diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa kecamatan Nglegok dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Nglegok, Januari 2020

CAMAT NGLEGOK



AAN ERNAWANTO, SE, MM  
Pembina Tk. I  
NIP.197004261997031003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistimatika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2015</b> .....	<b>8</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 .....	8
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	12
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	16
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>30</b>
3.1    Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD ..	
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	32
3.2    Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

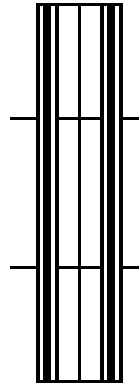
## **DAFTAR TABEL**

2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD s/d Tahun 2019 Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar .....	11
2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar .....	13
2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar .....	23
3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 .....	34



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN NGLEGOK**

**RANCANGAN AWAL RENJA  
KECAMATAN NGLEGOK  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN NGLEGOK**  
*Jalan Raya Penataran No.8 Telp.0342 – 551005 NGLEGOK*